



Radjobi Fr. Sinaga.

pejuang pemikir pemikir pejuang



DEKLARASI POLITIK

Handwritten signature

FRESIDIUM
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA



Handwritten squiggle

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(G. M. N. I.)
JAKARTA - RAYA



DEKLARASI POLITIK
17 PASAL
PRESIDIUM G.M.N.I.

(A). PENDAHULUAN.

Keadilan dan kemerdekaan adalah tuntutan universal budi nurani manusia yang mengilhami perjuangan kemanusiaan rakyat -rakyat segala bangsa. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil kristalisasi kerinet dan pikiran bangsa Indonesia yang berjuang karena tuntutan budi nurani kemanusiaannya untuk mendobrak belenggu ketidakadilan dan ketidakmerdekaan yang bersumber pada tata kehidupan masyarakat yang anti sosial didalam sistim kapitalisme dan imperialisme. Oleh karenanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hasil perjuangan Rakyat Indonesia, adalah sungguh-sungguh merupakan konsepsi penentang yang melawan segala bentuk ketidakadilan kapitalistis dan ketidak merdekaan imperialistis; dan bersamaan dengan itu akan dibangun tata susunan masyarakat dengan hubungan-hubungan sosial yang menyelamatkan rakyat banyak tanpa adanya diskriminasi apapun. Dalam pelaksanaannya hubungan-hubungan sosial, seperti tata hubungan politik, ekonomi, kebudayaan, dan lain-lainnya. Penyelenggaraan kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan dengan segala bentuk hubungan sosialnya yang mengingkari postulat diatas dengan memberi peluang untuk berjalannya ketidakadilan kapitalistis dan ketidakmerdekaan imperialistis terhadap kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia, pada dasarnya haruslah dipandang sebagai penyimpangan dari hakikat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan untuk mengisi kemerdekaan adalah mata rantai yang tak terpisahkan dari perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia sehingga iktiar untuk membangun Indonesia sekerang tidak boleh terlepas dari cita-cita dan semangat pergerakan rakyat pada jaman penjajahan dulu. Cita-cita dan semangat perjuangan pergerakan kemerdekaan itu sudah dirumuskan didalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena lahirnya pergerakan kemerdekaan dulu didorong oleh Amnat Penderitaan Rakyat yang timbul karena adanya ketidakadilan dalam tata hubungan sosial masyarakat dan adanya ketidakmerdekaan Bangsa Indonesia dalam tata hubungan kehidupan bangsa-bangsa, maka pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus mengandung semangat untuk memerangi ketidakadilan dan ketidakmerdekaan itu.

Dituntut oleh tanggung jawab yang besar untuk meluruskan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) memandang perlu untuk setiap saat mengadakan pemikiran ulang terhadap jalannya kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan dalam era pembangunan untuk mengisi kemerdekaan.

Berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Kongres ke VII yang berlangsung di Medan pada tanggal 2 sampai dengan 6 Desember 1979, maka diumumkanlah Deklarasi ini sebagai haluan politik Presidium GMNI yang meliputi bidang-bidang politik, ekonomi, kebudayaan dan pendidikan.

(B). BIDANG POLITIK.

- (1). GMNI berpendirian bahwa massa/rakyat yang terlibat dan mengabdikan bagian yang paling giat didalam proses produksi yang menunjang pembangunan nasional harus diikuti sertakan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan politik. Beginn massa/rakyat yang paling giat didalam proses produksi seperti massa petani dan buruh tani di pedesaan, nelayan, kaum buruh yang bekerja di pabrik-pabrik atau bentuk perusahaan lainnya, sekarang ini masih belum memperoleh peranan dalam proses pengambilan keputusan politik sepadan dengan tugas-tugas yang mereka pikul didalam proses produksi.
- (2). GMNI berpendirian bahwa azas "floating mass" dalam sistim kepartaian kita sekarang ini adalah bertentangan dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebab dengan diterapkannya azas "floating mass" berarti kita telah menjalankan diskriminasi politik terhadap massa rakyat di pedesaan yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia dan kekuatan produksi yang paling berjasa didalam pelaksanaan pembangunan nasional.
- (3). Untuk terselenggaranya kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan yang tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan pemerintahan yang kuat dan berorientasi kepada massa rakyat. Pemerintahan yang hanya merupakan pertobatan jabatan birokratis dan tidak berakar pada rakyat akan menjadi peluang bagi terselenggaranya alienasi penguasa-penguasa yang sangat membahayakan kehidupan demokrasi; didalam spektrum kehidupan perekonomian yang kapitalistik akan menje-

akan menjadi kekuatan politik baru yang hanya nempel dibawah persukaan akan tetapi sangat menentukan jalannya pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah kenegaraan dan kemasyarakatan. Oleh karenanya elineasi yang demikian harus ditolak, karena akan memberangus hak-hak politik rakyat dan melahirkan kehidupan anti sosial dalam masyarakat.

- (4). GMMI berpendirian bahwa lembaga-lembaga politik yang ada dalam kehidupan politik nasional, seperti Partai Politik, Organisasi Mahasiswa, Organisasi Pemuda dan lain-lainnya, haruslah menjadi komponen integral untuk melaksanakan cita-cita kerakyatan. Oleh karenanya diperlukan perubahan pola kepemimpinan didalam lembaga-lembaga politik tersebut dengan memberantas pola orientasi yang bersifat vertikal keatas dan diganti dengan pola orientasi untuk mewujudkan kehidupan pergerakan yang dinamis didalamnya.

Perubahan yang demikian hanya mungkin melalui serangkaian usaha pembaharuan yang tekun dan ulet dari lembaga-lembaga politik itu sendiri, disamping memang diperlukan toleransi yang lebih luas dari pihak pemerintah akan kedaulatan intern masing masing lembaga politik .

- (5). Dari pengalaman Pemilihan Umum 1971 dan 1977 kita dapat menarik pelajaran, bahwa dengan perangkat perundang-undangan yang ada sekarang dan praktek pelaksanaannya yang banyak melanggar hak-hak demokrasi, pemilihan umum hanya merupakan alat untuk mengesahkan kondisi kehidupan kenegaraan dan kebijaksanaan politik yang sudah terlanjur mepan. Padahal pembangunan yang berlangsung sangat cepat sekarang ini seringkali memerlukan perbaikan kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan melalui kebijaksanaan politik baru untuk meluruskan kembali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya perlu diadakan perubahan-perubahan fundamental terhadap perundang-undangan yang ada dan praktek politik yang sekarang masih berlaku, agar pemilihan umum dapat berlangsung lebih wajar dan DPR atau MPR dapat berfungsi lebih sehat sebagai pembawa suara rakyat.

Perubahan-perubahan yang segera mendesak adalah sebagai berikut :

- (a). Fosisahan secara tegas antara ABRI dan GOLKAR dan antara KORPRI dengan GOLKAR dalam praktik kehidupan politik.
- (b). Harus diikuti - sertakan secara aktif peranan partai politik dan Golkar dalam pelaksanaan dan pengawasan pemilihan umum.
- (c). Lembaga pengangkatan anggota-anggota DPR dan MPR perlu ditinjau kembali.

Disamping itu dalam pelaksanaan pemilu harus dihindari segala bentuk penekanan yang menimbulkan rasa takut seperti yang sudah terjadi pada pemilu 1971 dan 1977.

- (6). GNI berpendirian bahwa pemikiran kearah penetapan Undang - Undang yang mengatur tentang kehidupan organisasi massa, seperti Organisasi kepemudaan, Organisasi Kemahasiswaan, Organisasi Buruh dan lain-lainnya harus didasarkan pada realita peranan Organisasi Massa sekarang ini dan tidak mengingkari jiwa yang terkandung dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

(C). BIDANG EKONOMI.

- (7). Pembangunan selama dua kali Pelita telah menghasilkan sarana fisik dan pertumbuhan ekonomi yang tiada taranya dalam sejarah pembangunan di Indonesia. Tetapi serentak dengan membesarnya laju pembangunan nasional itu, kita menyaksikan jurang perbedaan sosial yang semakin tajam dan menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki angka ketimpangan sosial yang tertinggi diantara negara-negara sedang berkembang lainnya. GNI berpendapat, bahwa kepincangan sosial itu terjadi karena kita belum konsekwen melaksanakan tata hubungan perekonomian Pancasila seperti yang diatur oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
- (8). Diatas pundak rakyat Indonesia, sekarang ini dibebankan dua macam ketidakadilan yaitu :
 - (a). Ketidakadilan yang timbul karena kepincangan pembagian a -

lat produksi sebagai akibat dari pembangunan yang bersifat kapitalistik. Pincangnya pembagian alat-alat produksi ini mengakibatkan terjadinya pengumpulan kekayaan dan modal pada golongan kecil masyarakat dan menluasnya kemiskinan mass rakyat.

- (b). Ketidakadilan yang timbul karena hubungan-hubungan yang bersifat imperialistik dari negara-negara kreditor barat terhadap Indonesia.

Empat sifat imperialisme modern yang dikemukakan oleh Sukarno di depan pengadilan kolonial melalui pembelaannya yang kemudian dikenal dengan "Indonesia Menggugat" ternyata sangat relevan dengan situasi Indonesia sekarang ini.

Oleh karenanya GMI berpendirian, bahwa untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, dua macam ketidakadilan diatas harus dipandang sebagai rintangan aktif.

- (9). GMI berpendirian bahwa untuk meniadakan jurang perbedaan sosial yang sudah terlalu curam dalam susunan masyarakat Indonesia sekarang hanya mungkin apabila pemerintah dengan sungguh-sungguh menjalankan tindakan politik yang dapat meniadakan peranan serta kepentingan ekonomis golongan-golongan masyarakat yang sudah terlanjur menguasai jalannya perekonomian nasional karena diuntungkan oleh kebijaksanaan pembangunan yang sedang berjalan.

- (10). Khususnya terhadap persoalan hubungan pribumi-nonpribumi, GMI berpendirian bahwa persoalan tersebut pertama-tama haruslah dilihat dari sudut sosial-ekonomis, dan bukan semata-mata persoalan rasialisme.

Sangat diperlukan tindakan-tindakan khusus pemerintah agar persentase sektor-sektor perekonomian yang dikuasai oleh golongan asli Indonesia terus menerus diperluas untuk mengurangi dominasi non pribumi dibidang perekonomian. Usaha ini harus dikaitkan sebagai satu kesatuan dengan usaha menciptakan keadilan sosial.

- (11). Untuk menciptakan kehidupan politik dan perekonomian bangsa yang merdeka dan berdaulat, serta untuk mengakhiri ketagantungan Indonesia kepada negara-negara barat, hendaknya penyelenggara kekuasaan negara meninjau kembali politik bantuan luar negeri dan penanaman modal asing yang masih berlaku sekarang ini.

=====

(D). BIDANG KEBUDAYAAN.

- (12). GMI berpendirian bahwa untuk membangun sikap dan karakter bangsa agar menjadi manusia-manusia yang dinamis, ullet, suka bekerja keras, tidak mudah menyerah, berjiwa pelepas dan seterusnya itu sangat diperlukan situasi kultural yang mendukung. Pola kebudayaan Indonesia sekarang ini sangat diwarnai oleh semangat konsumerisme telah menghancurkan situasi kultural yang sehat bagi pertumbuhan karakter bangsa dan melahirkan generasi baru Indonesia yang santai, masa bodoh, mudah menyerah, dan seterusnya. Karakter demikian sangat membahayakan bagi ketahanan nasional kita. Oleh karenanya, pemerintah hendaknya menjalankan tindakan-tindakan politik untuk mengurangi semangat konsumerisme dan mengurangi secara bertahap situasi kehidupan di dalam masyarakat yang dapat menambat pertumbuhan karakter bangsa, khususnya generasi muda.

(E) BIDANG PENDIDIKAN DAN KEHIDUPAN PERGURUAN TINGGI.

- (13). GMI berpendirian bahwa sasaran pertama yang harus dicapai oleh pendidikan adalah usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang dikehendaki oleh preambule Undang - Undang Dasar 1945. Oleh karenanya skala prioritas pendidikan haruslah ditekankan untuk tercapainya pemerataan kesempatan pendidikan dengan apabila perlu sedikit mengorbankan kualitas sekolah.
- (14). Undang-Undang wajib belajar hendaknya segera dikeluarkan agar setiap warga negara dijamin memperoleh kesempatan belajar. Untuk memperbanyak jumlah sekolah, khususnya sekolah-sekolah kejuruan, hendaknya pemerintah merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 25 persen dari anggaran pendapat negara.
- (15). GMI berpendapat bahwa keresahan umum yang meliputi kehidupan perguruan tinggi dewasa ini disebabkan oleh bertemunya tiga kenyataan dibawah ini :
- Pertama : Tertutupnya kemungkinan perubahan terhadap kondisi kondisi politik yang sudah mapan melalui saluran - saluran formal diluar kampus.

Kedua : Adanya usaha-usaha untuk lebih mengisolasi kehidupan kampus dari situasi dinamik jalannya kehidupan kenegaraan - kemasyarakatan, dan

Ketiga : Adanya kenyataan bahwa mahasiswa memang berasal dari masyarakat dan hidup ditengah-tengah pergaulan hidup masyarakat, sehingga mungkin terlepas dari proses di dalamnya masyarakat.

Oleh karenanya GMNI berpendirian bahwa setiap kecenderungan untuk mengisolasi kampus dari persoalan-persoalan yang hidup di masyarakat selalu akan menimbulkan keresahan politik dalam kehidupan perguruan tinggi, dan penyelenggaraan kehidupan kampus yang sehat hanya mungkin apabila memperhatikan adanya kenyataan tipe diatas.

(16). GMNI berpendirian bahwa kehidupan perguruan tinggi harus memberikan syarat-syarat yang cukup untuk membentuk manusia ce-
utuhnya. Manusia intelektual atau cendekiawan dalam menerjunkan dirinya kedalam masyarakat tidaklah sepotong-potong, melainkan sebagai diri manusia yang utuh; bukan saja manusia penganalisa tetapi sekaligus terikat oleh hubungan-hubungan politik, ekonomi, kultural, dan hubungan-hubungan lainnya yang kedudukannya akan saling melengkapi. Oleh karenanya GMNI menolak setiap konsep yang mengarahkan mahasiswa menjadi manusia fragmentaris, sebab dengan demikian hanya akan menempatkan perguruan tinggi kedalam jebakan kepentingan sempit mekanisme kapitalisme.

(17). GMNI berpendirian bahwa perguruan tinggi harus menjadi bagian integral dari pembangunan untuk mengisai kemerdekaan .
Oleh karenanya disamping tugas rutinnnya sebagai lembaga ilmiah, perguruan tinggi juga harus terlibat untuk ikut menjawab tantangan-tantangan yang hidup sebagai akibat dijelaskannya pembangunan itu sendiri.

Jakarta,

Jakarta, 17 Desember 1979.

PRESIDIUM
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

ttd.

ttd

Daryatmo.M
Ketua Presidium

S u t o r o .Sb
Sekretaris Jenderal.

Lampiran sebagai pelengkap.

I. SUSUNAN PRESIDIUUM GMI.

1. Daryatno.M.
2. Firman Pembun.
3. Karyanto.W
4. Kristiyo Kartika.
5. Lukman Hakim.As.
6. Sudarjanto.
7. Sutoro.Sb.

II. KOMITE POLITIK PRESIDIUUM
GMI:

1. Sudarjanto, Ketua Herengkap anggota.
2. Darjatno.M, anggota.
3. Sutoro.Sb, anggota.

KOMISI POLITIK
KONGRES KE VII GMI

<u>Nama :</u>	<u>Delegasi dari :</u>	<u>Status :</u>
1. Serendji.T.P.	DPC GMI Malang	Peserta.
2. Iko.A.Suarnas	DPC GMI Bandung	Peserta.
3. Hary Hananda	DPC GMI Bandung	Peningju.
4. Herry Priyono	DPC GMI Surabaya	Peserta.
5. Heru Karyono	DPC GMI Surabaya	Peningju.
6. Suseno	DPC GMI Jember	Peserta.
7. G.Suhardji	DPC GMI Jember	Peningju.
8. Bambang Pranoto	DPC GMI Semarang	Peserta.
9. Sri Hardjanto	DPC GMI Semarang	Peningju.
10. Soeden Singodilaga	DPC GMI Palembang	Peserta.
11. Herry Sorongan	DPC GMI Jaya	Peningju.
12. Paulus Isk.Londo	DPC GMI Jaya	Peserta.
13. Ganti Arndji	DPC GMI Den Pasar	Peserta.
15. I.Wayon Sutano	DPC GMI Den Pasar	Peningju.
16. Teddy.H,Sunggu	DPC GMI Medan	Peserta.
17. Setio Hartono	DPC GMI Bogor	Peserta.
18. Demiri Hasan	DPC GMI Tanjung Karang	Peningju.
19. D.T.Siswadi	DPC GMI Solo	Peserta.
20. Hekawan Sjan	DPC GMI Garut	Peserta.
21. Ade Rusman	DPC GMI Garut	Peningju.
22. Kaniyo.S	DPC GMI Jogjakarta	Peserta.
23. Adi Rustanto	DPC GMI Jogjakarta	Peningju.
24. Mutut Broto Suyono	DPC GMI Purwokerto	Peserta.
25. La Ode Aly.B.	DPC GMI Samarinda	Peningju.
26. Victor Alangan	Presidium Demisioner	Peningju.